

# Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat

**Monica**

Universitas Andalas Padang  
[ntamonica91@gmail.com](mailto:ntamonica91@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 26 Desember 2022

Disetujui : 31 Januari 2023

Dipublikasi : 1 April 2023

## **ABSTRACT**

The Health Conditions of Local Government Finances are useful for viewing and assessing the ability of local governments to manage their respective regional finances. Local governments are expected to maximize revenue and all the potential of the area they have. This is what triggers variations in the Financial Health Conditions in Regional Governments. This study aims to analyze the factors that influence variations in the Financial Health Conditions of Regency/City Regional Governments in West Sumatra Province in 2019-2021. This study uses 57 Financial Report data. This research is a quantitative study using multiple regression analysis to test the effect of each variable on the Financial Health Conditions of the Local Government. Data processing was carried out using SPSS version 26. The results showed that the factor influencing the Financial Health Conditions of Local Governments was Financial Efficiency. While population, community age profile, community welfare level, population density, local revenue, and cost of goods and services have no effect on the condition of the financial health of local governments. This shows that the Regency/City Regional Governments in West Sumatra Province have been able to manage Regional Government expenditures, especially personnel expenditures, so that the Regional Governments can carry out Financial Efficiency well.

Keywords: Financial Efficiency; Financial Health Conditions; Local Government.

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah merupakan isu yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Seperti yang kita ketahui, bahwa hanya sedikit daerah yang dapat mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerahnya secara maksimal, yang pada akhirnya pemerintah daerah tersebut mampu secara nyata dan bertahap dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerahnya (Suryani., Basri, & Faisal., 2016). Demikian juga dengan kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber keuangannya, akan sangat bergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut (Suryani dkk., 2016). Otonomi daerah juga memberikan peluang pada pemerintah daerah untuk dapat mengaktualisasikan berbagai potensi terbaik yang dimiliki pemerintah daerah tersebut dengan lebih optimal (Safitri, 2016). Pemerintah daerah harus berupaya untuk dapat mengelola berbagai potensi daerah yang dimiliki daerah tersebut, seperti potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia serta potensi sumber daya keuangan dengan lebih optimal (Rumapea & Siringoringo, 2020). Namun kenyatannya pada saat ini, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu), pernah menyoroti APBD dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sejauh ini, beberapa Pemda belum mampu memanfaatkan dana tersebut secara optimal (Koran Online *Merdeka.com*, 8 Desember 2021). Transfer APBN yang diberikan kepada daerah rupanya belum bisa mendorong pembangunan di daerah (Koran Online *Merdeka.com*, 8

Desember 2021). Menurut Sri Mulyani, melihat pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dengan indikasi besarnya belanja birokrasi, seperti belanja pegawai dan belanja-belanja barang dan jasa, yang rata-rata mencapai 59 persen daripada total anggaran daerah, dalam waktu 3 tahun terakhir (Koran Online *Merdeka.com*, 8 Desember 2021). Hal ini membuat adanya variasi kondisi kesehatan keuangan Pemda.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengeksplorasi berbagai potensi sumber pendanaan baru yang nantinya Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi daerah yang mandiri untuk kedepannya (Maizunati, 2017). Hal ini mengakibatkan setiap Pemerintah Daerah (Pemda) akan memiliki berbagai program dan kegiatannya sendiri berdasarkan pandangan masyarakatnya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi politik. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Program dan kegiatan Pemda tersebut dilaksanakan dengan dibiayai menggunakan anggaran Pemda. Karena tiap-tiap Pemda mempunyai program dan kegiatan yang berbeda-beda, maka masing-masing Pemda juga akan mempunyai alokasi anggaran yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, Kondisi Kesehatan Keuangan antara Pemda yang satu dengan Pemda lainnya akan bervariasi (Yati & Asmara, 2020).

Pengalokasian anggaran Pemda tersebut akan berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Mengetahui Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda adalah hal yang sangat penting sebab Pemda berperan sebagai penyedia utama dalam melakukan pelayanan secara langsung pada masyarakat. Jika suatu daerah keuangannya baik berarti daerah itu mempunyai kemampuan keuangan dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah tersebut (Panjaitan, 2020). Kondisi kesehatan keuangan adalah kemampuan Pemda dalam melakukan penyediaan jasa yang memadai dalam rangka memenuhi kewajiban yang ada saat ini dan kewajiban pada masa yang akan datang (Wang, Dennis, & Tu, 2007).

Kondisi Kesehatan Keuangan juga bisa disebut dengan istilah kondisi fiskal, kesehatan fiskal atau kondisi kesehatan fiskal. Namun sebagian ahli lainnya menggunakan istilah kesulitan keuangan, tekanan fiskal, atau krisis fiskal. Hal ini diperbolehkan tergantung bagaimana kita memaknai istilah tersebut (Honadle, Costa, & Cigler, 2004). Informasi mengenai kondisi kesehatan fiskal merupakan informasi penting, karena informasi ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kemampuan Pemda dalam memberikan pelayanan pada masyarakat (Casal & Gomez, 2011). Istilah kondisi kesehatan keuangan paling banyak diartikan dengan kemampuan sebuah organisasi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu (Wang et al., 2007). Kondisi Kesehatan Keuangan ini dianalisis dengan menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Teori yang digunakan adalah Teori Permintaan dan Penawaran yang dikembangkan oleh Keynes. Menurut Deacon (1978) dalam Ritonga *et al.* (2019) teori permintaan bisa diterapkan pada pengeluaran sektor publik, sebab anggaran sektor publik pengalokasiannya diantaranya yaitu untuk layanan dengan menggunakan metode yang hampir sesuai dengan rumah tangga, yaitu melakukan alokasi pendapatan pada komoditas swasta. Menurut Ritonga *et al.* (2019) teori permintaan dan penawaran akan menjadi landasan dasar untuk menjelaskan hubungan antara Kondisi Kesehatan Keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda, diantaranya Populasi Penduduk, Profil Usia Masyarakat, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Kepadatan Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan, serta Biaya Barang dan Jasa. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia pernah dilakukan oleh Ritonga *et al.*, (2019) yang hasil penelitiannya menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan Pemerintah Daerah adalah jumlah penduduk, biaya produksi barang dan jasa, efisiensi keuangan, dan pendapatan daerah. Faktor yang tidak mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan Pemerintah Daerah adalah kepadatan penduduk, profil umur masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis termotivasi ingin menguji kembali penelitian Ritonga *et al.*, (2019) dengan mengambil sampel seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. Penulis

ingin melihat apakah hasil penelitian Ritonga *et al.*, (2019) konsisten ataukah tidak dengan mengambil sampel seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat tanpa terkecuali.

Informasi Kondisi Kesehatan Keuangan merupakan informasi yang sangat penting, karena informasi ini berguna untuk melihat dan menilai kesehatan Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. *Monitoring* terhadap kondisi kesehatan keuangan secara periodik juga merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam membentuk suatu peringatan dini bagi Pemda (Maizunati, 2017). Sangat rendahnya kesadaran Pemda terhadap kondisi kesehatan keuangan sebagai suatu sistem peringatan dini, akan menyebabkan pihak yang berkepentingan sulit dalam hal pengambilan keputusan (Priyono, 2015). Selain itu, hasil analisis kondisi kesehatan keuangan Pemda juga akan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Pemda (Rusmin, Astami, & Scully, 2014). Oleh sebab itu, para pemangku kepentingan juga harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan variasi dan perbedaan kondisi kesehatan keuangan Pemda tersebut.

Populasi Penduduk berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili pada wilayah geografis Negara Indonesia dalam waktu enam bulan atau lebih dan atau semua orang yang berdomisili dalam waktu kurang dari enam bulan namun tujuannya adalah untuk menetap. Peningkatan atau penurunan jumlah penduduk akan dihadapkan pada seberapa cepat kemampuan dalam meningkatkan sarana pemuas kebutuhan tersebut dan juga sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan (Marseno & Mulyani, 2020). Adanya penambahan jumlah penduduk pada masing-masing Pemda akan berdampak pada peningkatan belanja Pemda (Marseno & Mulyani, 2020). Hal ini berarti, ketika terjadi peningkatan jumlah Populasi Penduduk maka akan menuntut peningkatan pada pengeluaran Pemda, yang nantinya akan mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan Pemda (Wang *et al.*, 2007).

**H1:** Populasi Penduduk berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah.

Profil Usia Masyarakat berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Pemda yang mempunyai persentase komposisi masyarakat yang lebih tinggi dengan Profil Usia Masyarakat non kerja, menyebabkan Pemda akan menghadapi tingginya permintaan belanja dibandingkan dengan Pemda yang mempunyai masyarakat dengan persentase Profil Usia Masyarakat non kelompok kerja yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan peningkatan pada belanja Pemda, dan juga akan meningkatkan pengeluaran per kapita. Hal ini akan mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.

**H2:** Profil Usia Masyarakat berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan program pembangunan yang menfokuskan pada program peningkatan kemampuan dasar manusia, diantaranya adalah mendapatkan penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak (Hamid, 2018). Orang yang memiliki pendapatan pribadi yang lebih tinggi, maka akan meningkatkan pengeluaran dan juga daya beli (Wang *et al.*, 2007). Oleh sebab itu, apabila sebuah daerah lebih didominasi oleh masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, maka juga akan menyebabkan peningkatan pada barang dan jasa yang disediakan oleh Pemda. Hal inilah yang menyebabkan adanya peningkatan pada pengeluaran Pemda dan juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan Pemda.

**H3:** Tingkat Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kepadatan Penduduk berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Kepadatan Penduduk merupakan seberapa banyak jumlah penduduk pada setiap satuan unit wilayah. Kepadatan penduduk menjelaskan jumlah rata-rata penduduk per km<sup>2</sup> pada suatu wilayah (Huda *et al.*, 2015). Tingkat Kepadatan Penduduk yang tinggi dapat berpengaruh pada penyediaan layanan pada masyarakat (Santis, 2020). Peningkatan yang terjadi pada tingkat Kepadatan Penduduk diyakini dapat menyebabkan berkurangnya biaya pada setiap unit barang dan jasa yang dihasilkan oleh Pemda. Jika terjadi peningkatan pada Kepadatan Penduduk ini

berarti Pemda akan memerlukan lebih banyak sarana dan prasarana sebagai akibat dari konsekuensi logis dari adanya kewajiban pemerintah dalam hal memberikan pelayanan pada publik yang dapat terwujud melalui anggaran belanja Pemda (Huda dkk., 2015).

**H4:** Kepadatan Penduduk berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Pendapatan ini berfokus pada dari mana Pemda dapat memperoleh pendapatannya. Jika Pemda dapat menerima sumber-sumber keuangan yang cukup untuk menjalankan fungsinya, ini berarti Pemda dapat menerapkan desentralisasi dengan baik (Nasution, 2010). Prinsipnya adalah ketergantungan Pemda pada pemerintah pusat akan semakin kecil apabila semakin besarnya sumbangan PAD pada APBD. Oleh karena itu, jumlah PAD yang kuat akan mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan Pemda tersebut. Karena PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang digunakan dalam membiayai belanja Pemda.

**H5:** Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah.

Efisiensi Keuangan berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Efisiensi yaitu capaian output yang semaksimal mungkin dengan menggunakan input terendah (Rondonuwu et al., 2015). Jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang paling rendah maka proses kegiatan operasional tersebut dapat dikatakan efisien (Sumenge, 2013). Oleh karena itu, jika Pemda dapat melaksanakan efisiensi keuangan maka akan menurunkan juga biaya pada setiap unit barang dan jasa. Dengan demikian, Pemda bisa melakukan penyediaan barang dan jasa lebih banyak pada masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan Pemda.

**H6:** Efisiensi Keuangan berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah.

Biaya Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Upah minimum Pemda adalah penentu utama dalam melakukan penyediaan barang dan jasa oleh Pemda. Jika terjadi peningkatan upah minimum Pemda, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan transaksi pada barang dan jasa di daerah. Hasilnya, perekonomian akan meningkat dan berjalan lebih baik serta pendapatan Pemda yang bersumber dari pajak dan retribusi juga akan meningkat. Hal ini akan mendorong terjadinya perbaikan terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.

**H7:** Biaya Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah.

## STUDI LITERATUR

### Penelitian Terdahulu

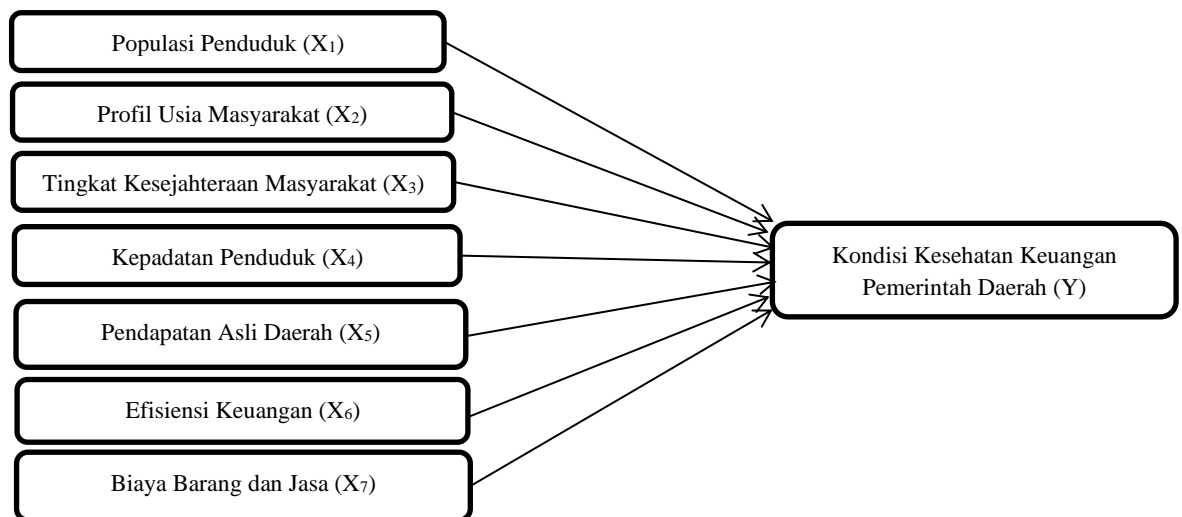
Pada penelitian Ritonga *et al.*, (2019) mengukur Kondisi Kesehatan Keuangan dengan menggunakan enam dimensi dan terdiri dari 19 indikator. Enam dimensi tersebut, yaitu: solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas tingkat layanan, fleksibilitas keuangan, dan kemandirian keuangan. Menurut Ritonga *et al.*, (2019) menyatakan bahwa faktor signifikan yang mempengaruhi kondisi keuangan Pemerintah Daerah adalah jumlah penduduk, biaya produksi barang dan jasa, efisiensi keuangan, dan pendapatan. Faktor yang tidak signifikan yang mempengaruhi kondisi keuangan Pemerintah Daerah adalah kepadatan penduduk, profil umur masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Santis (2020) mengukur kondisi keuangan atau dalam artikel ini menggunakan istilah keberlanjutan keuangan, keberlanjutan keuangan diukur dengan menggunakan laporan laba rugi karena sangat erat kaitannya dengan pendapatan. Menurut Santis (2020) menyatakan bahwa kondisi keuangan/keberlanjutan keuangan terdiri dari faktor demografi dan faktor ekonomi. Faktor demografi diantaranya adalah: ukuran populasi penduduk, kepadatan penduduk, jumlah penduduk dibawah usia 15 tahun, jumlah penduduk diatas usia 65 tahun, dan tingkat imigrasi. Dan faktor ekonomi diantaranya adalah: pendapatan saat ini, pengeluaran saat ini, tingkat otonomi keuangan, keseimbangan saat ini, tingkat utang, dan tingkat investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor demografi diantaranya: ukuran populasi penduduk,

kepadatan penduduk, jumlah penduduk dibawah usia 15 tahun, jumlah penduduk diatas usia 65 tahun, dan tingkat imigrasi tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah di Italia. Sementara faktor ekonomi diantaranya: tingkat otonomi keuangan dan tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah di Italia.

Menurut Suryawati (2018) menemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan fiskal di Kabupaten Bondowoso adalah jumlah penduduk, sumber utama pendapatan daerah, kemampuan mengelola belanja, serta jumlah pegawai yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Pada penelitian ini, penulis termotivasi ingin menguji kembali penelitian Ritonga *et al.*, (2019) dengan mengambil sampel seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. Penulis ingin melihat apakah hasil penelitian Ritonga *et al.*, (2019) konsisten ataukah tidak dengan mengambil sampel seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat tanpa terkecuali. Penelitian ini dilakukan selama tiga tahun pengamatan, yaitu tahun 2019-2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPK Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini berupaya untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah gambaran mengenai kerangka model pada penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

### METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah 57 data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari Badan Pengawas Keuangan Provinsi Sumatera Barat dan Laporan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel atau biasa disebut dengan sensus. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 26 untuk mengolah, menguji, dan menganalisis data.

Kondisi Kesehatan Keuangan merupakan kemampuan sebuah organisasi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu (Wang *et al.*, 2007). Analisis Kondisi Kesehatan Keuangan dilakukan menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Berikut ini merupakan pengukuran kondisi kesehatan keuangan Pemda menggunakan model enam dimensi Ritonga (2014):

Solvabilitas Jangka Pendek, terdiri dari:

Rasio A = (Kas + Setara Kas+ Investasi jangka pendek): Kewajiban Lancar

Rasio B = (Kas + Setara Kas + Investasi Jangka Pendek + Akun Piutang): Kewajiban Lancar

Rasio C = Aktiva Lancar: Kewajiban Lancar

Solvabilitas Anggaran, terdiri dari:

Rasio A = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): (Total Belanja –Belanja Modal)

Rasio B = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): Belanja Operasional

Rasio C = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): Belanja Pegawai

Rasio D = Total Pendapatan: Total Belanja

Solvabilitas Jangka Panjang, terdiri dari:

Rasio A = Kewajiban Jangka Panjang: Total Aset

Rasio B = Kewajiban Jangka Panjang: Ekuitas dan Investasi

Rasio C = Ekuitas dan Investasi: Total Aset

Solvabilitas Tingkat Layanan, terdiri dari:

Rasio A = Total Ekuitas: Jumlah Penduduk

Rasio B = Total Aset: Jumlah Penduduk

Rasio C = Total Belanja: Jumlah Penduduk

Fleksibilitas Keuangan, terdiri dari:

Rasio A = (Total Pendapatan -Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Belanja Pegawai):  
(Pembayaran Pokok Pinjaman + Belanja Bunga)

Rasio B = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Belanja Pegawai): Jumlah  
Kewajiban

Rasio C = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Belanja Pegawai): Kewajiban  
Jangka Panjang

Rasio D = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): Jumlah Kewajiban

Kemandirian Keuangan, terdiri dari:

Rasio A = Total Pendapatan Asli Daerah: Total Pendapatan

Rasio B = Total Pendapatan Asli Daerah: Total Belanja

Berikut ini adalah definisi operasional dan pengukuran yang digunakan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda:

Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili pada wilayah geografis Negara Indonesia dalam waktu enam bulan atau lebih dan atau semua orang yang berdomisili dalam waktu kurang dari enam bulan namun tujuannya adalah untuk menetap. Populasi Penduduk diukur dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Penduduk} = \frac{P_1}{P} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

P<sub>1</sub>= Jumlah Populasi Wilayah Kab/Kota/Provinsi

P = Total Populasi Penduduk

Profil usia masyarakat merupakan pengkategorian masyarakat pada kategori berdasarkan usia produktifitas. Profil Usia Masyarakat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{penduduk di bawah 18 tahun} + \text{penduduk di atas 60 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \dots \dots \dots (2)$$

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat merupakan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan barang dan jasa. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat Kesejahteraan Masyarakat} = \frac{\text{jumlah penduduk diatas garis kemiskinan}}{\text{jumlah penduduk}} \dots \dots \dots (3)$$



Kepadatan penduduk menjelaskan jumlah rata-rata penduduk per km<sup>2</sup> pada suatu wilayah (Huda et al., 2015). Kepadatan Penduduk diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk}}{\text{wilayah yurisdiksi dalam km persegi pada periode tertentu}} \dots\dots\dots(4)$$

Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh sumber pemasukan kas daerah dalam tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah diukur dengan menggunakan rumus:

Menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019–2021  
 PAD = PD +RD + HPKD +LPD

Keterangan:

- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- PD = Pajak Daerah
- RD = Restribusi Daerah
- HPKD = Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- LPD = Lain – lain PAD yang sah
- DP = DBH + DAU + DAK

Keterangan:

- DP = Dana Perimbangan
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- LPS = HIBAH + DD + PL

Keterangan:

- LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah
- PD = Dana Darurat
- PI = Pendapatan Lainnya

Pengukuran pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Efisiensi keuangan terkait dengan belanja suatu daerah dalam hal belanja pegawai. Efisiensi Keuangan diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{total pengeluaran}}{\text{pengeluaran pegawai}} \dots\dots\dots(6)$$

Biaya Barang dan Jasa merupakan upah tenaga kerja yang dikeluarkan dalam memproduksi barang dan jasa. Biaya Barang dan Jasa diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Biaya Barang dan Jasa} = \text{Upah Minimum Regional} \dots\dots\dots(7)$$

Prosedur Penelitian:

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan didalam perhitungan Kondisi Kesehatan Keuangan yang dilakukan oleh Ritonga (2014) adalah:

Prosedur 1: Membangun indeks gabungan Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda sebagai

Variabel Dependen

1. Menghitung semua indikator yang membentuk dimensi kondisi keuangan.
2. Mengembangkan indeks indikator, setiap indikator dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{(\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Min})}{(\text{Nilai Max} - \text{Nilai Min})}$$

3. Menentukan indeks dimensi dengan menggunakan mean aritmatika, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{\sum \text{IRXi}}{n}$$

dimana = IRXi : Indeks Rasio  
 n : Jumlah Rasio yang membentuk dimensi.

4. Mengembangkan Indeks Kondisi Keuangan Komposit (FCI), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{FCI} = \frac{\sum \text{DI}}{n} \dots \dots \dots (8)$$

Dimana = FCI : Indeks Kondisi Keuangan  
 DI : Indeks Dimensi  
 n : Jumlah Dimensi

5. Pengkategorian atas Indeks Komposit Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 1. Pengkategorian IKK

| No | Penilaian   | Keterangan  |
|----|-------------|---|
| 1. | Baik        | jika nilai IKK lebih besar dari nilai <i>mean</i> + (1 x standar deviasi)   |
| 2. | Cukup Baik  | jika nilai IKK berada diantara nilai <i>mean</i> - (1 x standar deviasi) dan <i>mean</i> + (1 x standar deviasi). |
| 3. | Kurang Baik | jika nilai IKK kurang dari nilai <i>mean</i> - (1 x standar deviasi)  |

Sumber: Ritonga (2014)

Prosedur 2: Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan. Digunakan model regresi berganda untuk menguji hipotesis. Model regresi berganda adalah:

$$\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 \text{FCI} = \alpha + X_6 + \beta_7 X_7 + \varepsilon$$

dimana:

- FCI = indeks kondisi keuangan
- $\alpha$  = suku intersep keseluruhan
- $\beta_i$  = koefisien regresi
- X<sub>1</sub> = Populasi Penduduk
- X<sub>2</sub> = Profil Usia Masyarakat
- X<sub>3</sub> = Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
- X<sub>4</sub> = Kepadatan Penduduk
- X<sub>5</sub> = Pendapatan Asli Daerah
- X<sub>6</sub> = Efisiensi Keuangan
- X<sub>7</sub> = Biaya Barang dan Jasa
- $\varepsilon$  = nilai sisa

Kemudian, tahap ini diakhiri dengan menguji asumsi yang mendasari model regresi berganda.



## HASIL

Penelitian ini dilakukan pada Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 57. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019-2021. Sebelum melakukan uji analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dari hasil analisis dan uji data yang dilakukan, model regresi ini dinyatakan lulus dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi berganda.

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Descriptive Statistics**

|  | N  | Minimum | Maximum | Sum   | Mean  | Std. Deviation |
|--|----|---------|---------|-------|-------|----------------|
| Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda (Fci) | 57 | .09     | .50     | 11.25 | .1974 | .08303         |
| Valid N (listwise)                     | 57 |         |         |       |       |                |

Sumber: Data Penelitian, 2019-2021

**Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda**

|       |                                  | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |        |      | Collinearity Statistics |       |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| Model |                                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Tolerance               | VIF   |
|       |                                  | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |                         |       |
| 1     | (Constant)                       | -.811                       | .529       |                           | -1.534 | .132 |                         |       |
|       | Populasi Penduduk                | -.002                       | .003       | -.105                     | -.810  | .422 | .585                    | 1.708 |
|       | Profil Usia Masyarakat           | .600                        | .488       | .140                      | 1.229  | .225 | .755                    | 1.325 |
|       | Tingkat Kesejahteraan Masyarakat | .477                        | .382       | .150                      | 1.249  | .218 | .683                    | 1.464 |
|       | Kepadatan Penduduk               | 1.534E-5                    | .000       | .221                      | 1.904  | .063 | .727                    | 1.376 |
|       | Pendapatan Asli Daerah           | .042                        | .075       | .075                      | .565   | .574 | .555                    | 1.803 |
|       | Efisiensi Keuangan               | .150                        | .037       | .590                      | 4.032  | .000 | .460                    | 2.176 |
|       | Biaya Barang dan Jasa            | -2.594E-8                   | .000       | -.029                     | -.272  | .786 | .871                    | 1.149 |

a. Dependent Variable: Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda (Fci)

Sumber: Data Penelitian, 2019-2021

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam penelitian ini yaitu Populasi Penduduk ( $X_1$ ), Profil Usia Masyarakat ( $X_2$ ), Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ( $X_3$ ), Kepadatan Penduduk ( $X_4$ ), Pendapatan Asli Daerah ( $X_5$ ), Efisiensi Keuangan ( $X_6$ ), Biaya Barang dan Jasa ( $X_7$ ) sebagai variabel independen terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebagai variabel dependen.

Jika dilihat dari nilai Sig. Populasi Penduduk, nilai Sig. sebesar  $0,422 > 0,05$ . Artinya Populasi Penduduk tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan. Jika dilihat dari nilai t hitung sebesar  $-0,810$ , sementara nilai t tabel sebesar  $2,009$ . Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, artinya tidak terdapat pengaruh variabel Populasi Penduduk terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan.

Jika dilihat dari nilai Sig. Profil Usia Masyarakat, nilai Sig. sebesar  $0,225 > 0,05$ . Artinya Profil Usia Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan. Jika dilihat dari nilai t hitung sebesar  $1,229$ , sementara nilai t tabel sebesar  $2,009$ . Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, artinya tidak terdapat pengaruh variabel Populasi Penduduk terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan.

Jika dilihat dari nilai Sig. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, nilai Sig. Sebesar  $0,218 > 0,05$ . Artinya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan. Jika dilihat dari nilai t hitung sebesar  $1,249$ , sementara nilai t tabel sebesar  $2,009$ . Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, artinya tidak terdapat pengaruh variabel Populasi Penduduk terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan.

Jika dilihat dari nilai Sig. Kepadatan Penduduk, nilai Sig. Sebesar  $0,063 > 0,05$ . Artinya Kepadatan Penduduk tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan. Jika dilihat dari nilai t hitung sebesar  $1,904$ , sementara nilai t tabel sebesar  $2,009$ . Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, artinya tidak terdapat pengaruh variabel Populasi Penduduk terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan.

Jika dilihat dari nilai Sig. Pendapatan Asli Daerah, nilai Sig. Sebesar  $0,574 > 0,05$ . Artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan. Jika dilihat dari nilai t hitung sebesar  $0,565$ , sementara nilai t tabel sebesar  $2,009$ . Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, artinya tidak terdapat pengaruh variabel Populasi Penduduk terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan.

Jika dilihat dari nilai Sig. Efisiensi Keuangan, nilai Sig. sebesar  $0,00 < 0,05$ . Artinya Efisiensi Keuangan berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan. Jika dilihat dari nilai t hitung sebesar  $4,032$ , sementara nilai t tabel sebesar  $2,009$ . Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, artinya terdapat pengaruh antara variabel Populasi Penduduk terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan.

Jika dilihat dari nilai Sig. Biaya Barang dan Jasa, nilai Sig. Sebesar  $0,786 > 0,05$ . Artinya Biaya Barang dan Jasa tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan. Jika dilihat dari nilai t hitung sebesar  $-0,272$ , sementara nilai t tabel sebesar  $2,009$ . Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, artinya tidak terdapat pengaruh variabel Populasi Penduduk terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan.

Tabel 4. Hasil Uji-F  
ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | .200           | 7  | .029        | 7.530 | .000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | .186           | 49 | .004        |       |                   |
|       | Total      | .386           | 56 |             |       |                   |

- a. Dependent Variable: Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda (Fci)
- b. Predictors: (Constant), Biaya Barang dan Jasa, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Populasi Penduduk, Profil Usia Masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, Kepadatan Penduduk, Efisiensi Keuangan

*Sumber:* Data Penelitian, 2019-2021

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah fix atau belum, dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel Populasi Penduduk ( $X_1$ ), Profil Usia Masyarakat ( $X_2$ ), Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ( $X_3$ ), Kepadatan Penduduk ( $X_4$ ), Pendapatan Asli Daerah ( $X_5$ ), Efisiensi Keuangan ( $X_6$ ), dan Biaya Barang dan Jasa ( $X_7$ ) sebagai variabel independen terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebagai variabel dependen secara keseluruhan atau secara simultan.

Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai Sig. yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level  $\alpha = 0,05$ . Apabila nilai Sig. yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah fix variabel Populasi Penduduk ( $X_1$ ), Profil Usia Masyarakat ( $X_2$ ), Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ( $X_3$ ), Kepadatan Penduduk ( $X_4$ ), Pendapatan Asli Daerah ( $X_5$ ), Efisiensi Keuangan ( $X_6$ ), dan Biaya Barang dan Jasa ( $X_7$ ) sebagai variabel independen berpengaruh secara keseluruhan terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebagai variabel dependen.

Dari Tabel 4 diatas dapat kita lihat bahwa nilai Sig. adalah sebesar 0,00 artinya  $< 0,05$ . Ini berarti bahwa variabel Populasi Penduduk, Profil Usia Masyarakat, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Kepadatan Penduduk, PAD, Efisiensi Keuangan, Biaya Barang dan Jasa secara simultan berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan.

## PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda, diperoleh hasil bahwa faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda adalah Efisiensi Keuangan. Hal ini dikarenakan Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sudah mampu mengelola belanja Pemda khususnya belanja pegawai, sehingga Pemda dapat melakukan Efisiensi Keuangan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Hasil ini mendukung penelitian Ritonga et al., (2019) yang juga menemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda adalah Efisiensi Keuangan. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada rasio Efisiensi Keuangan juga akan meningkatkan Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Sedangkan, faktor yang tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda adalah Populasi Penduduk, Profil Usia Masyarakat, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Kepadatan Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, dan Biaya Barang dan Jasa. Hal ini disebabkan karena masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu memenuhi kewajibannya baik dalam bentuk utang maupun dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Untuk variabel Populasi Penduduk merupakan faktor yang tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Hasil ini mendukung penelitian Wang et al., (2007) dan Santis (2020). Hal ini mungkin disebabkan karena peningkatan Populasi Penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan barang dan jasa yang disediakan oleh Pemda, sehingga pengeluaran Pemda dalam menyediakan layanan untuk publik juga tidak meningkat. Karena itu tidak terdapat pengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Sementara berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ritonga et al., (2019), Casal & Gomez (2011), Brusca et al., (2015), dan Bolivar et al., (2016) yang menyimpulkan bahwa Populasi Penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.

Untuk variabel Profil Usia Masyarakat merupakan faktor yang tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Hasil ini mendukung penelitian Ritonga et al., (2019) dan Santis (2020) yang juga menemukan bahwa Profil Usia Masyarakat merupakan faktor yang tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda karena mungkin Pemda tidak menyediakan fasilitas untuk Penduduk yang berusia dibawah 18 tahun maupun Penduduk yang berusia diatas

60 tahun sehingga Pemda tidak perlu melakukan pengeluaran dalam memenuhi fasilitas publik tersebut, akibatnya tidak terjadi variasi peningkatan pada Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Sehingga rasio Profil Usia Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.

Untuk variabel Tingkat Kesejahteraan Masyarakat merupakan faktor yang tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Hasil ini mendukung penelitian Ritonga *et al.*, (2019), hal ini mungkin disebabkan karena setiap terjadi peningkatan pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat tidak diiringi dengan peningkatan sumber daya dan pendapatan bagi Pemda dalam bentuk pajak dan retribusi. Sehingga tidak terdapat pengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Sementara berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Priyono (2015) yang menyimpulkan bahwa Tingkat Kesejahteraan Masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.

Untuk variabel Kepadatan Penduduk merupakan faktor yang tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Hasil ini mendukung penelitian Ritonga *et al.*, (2019) dan Santis (2020), hal ini mungkin disebabkan karena setiap terjadi peningkatan pada Kepadatan Penduduk tidak diiringi dengan peningkatan fasilitas publik. Sehingga hal ini tidak akan meningkatkan pengeluaran Pemda dalam segi belanja, karena itu hal ini tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Sementara berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Brusca *et al.*, (2015) yang menyimpulkan bahwa Kepadatan Penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.

Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda, hal ini mungkin disebabkan karena setiap terjadi peningkatan PAD tidak diiringi dengan peningkatan program kerja Pemda dalam membangun sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menunjang terjadinya peningkatan PAD ditahun berikutnya. Sementara hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ritonga *et al.*, (2019) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.

Untuk variabel Biaya Barang dan Jasa merupakan faktor yang tidak mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda, hal ini mungkin disebabkan karena setiap terjadi peningkatan pada Upah Minimum tidak diiringi dengan peningkatan transaksi biaya barang dan jasa sehingga Pendapatan Pemda dalam bentuk pajak dan retribusi juga tidak meningkat. Hal ini juga tidak akan mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda kearah yang lebih baik. Sementara hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ritonga *et al.*, (2019) yang menyimpulkan bahwa Biaya Barang dan Jasa merupakan faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kondisi Kesehatan Keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2019-2021. Analisis Kondisi Kesehatan Keuangan dilakukan menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014). Terdapat 57 data laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis dan uji data yang dilakukan menunjukkan bahwa Efisiensi Keuangan berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sudah mampu mengelola belanja Pemda khususnya belanja pegawai, sehingga Pemda dapat melakukan Efisiensi Keuangan dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Artinya setiap terjadi peningkatan pada rasio Efisiensi Keuangan juga akan meningkatkan Kondisi Kesehatan Keuangan Pemda. Sementara Populasi Penduduk, Profil Usia Masyarakat, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Kepadatan Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, dan Biaya Barang dan Jasa tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu memenuhi kewajibannya baik dalam bentuk utang maupun dalam

memberikan pelayanan kepada publik. Hasil penelitian ini berkontribusi bagi pemerintah daerah khususnya Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat agar lebih memperhatikan Efisiensi Keuangan apabila ingin memperbaiki kondisi keuangan pemda tersebut. Karena Efisiensi Keuangan ini merupakan hal yang dapat dikendalikan oleh masing-masing Pemda. Efisiensi Keuangan ini dapat dilakukan jika Pemda dapat mengevaluasi belanja operasionalnya dan juga menetapkan beberapa strategi untuk mengurangi belanja-belanja pegawai yang tidak bermanfaat. Kelemahan pada penelitian ini adalah sulitnya penulis mendapatkan beberapa data pada sebagian pemda kabupaten/kota karena laporan keuangannya tidak lengkap.

#### REFERENSI

- Anwar, C. J., & Andria, M. P. (2016). *Hubungan Variabel Makroekonomi Dengan Permintaan Uang di Indonesia Sebelum dan Sesudah Krisis Moneter*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 6, Nomor 1., Halaman 68-80.
- Bolivar, M. P. R., Galera, A. N., Munoz, L. A., & Subires, M. D. L. (2016). *Analyzing Forces to the Financial Contribution of Local Governments to Sustainable Development*. MDPI, 1-18.
- Brusca, I., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2015). *Drivers for the Financial Condition of Local Government: A Comparative Study Between Italy and Spain*. Lex Localis - Journal of Local Self-Government, Vol. 13, No. 2, pp. 161 - 184.
- Casal, R. C., & Gomez, E. B. (2011). *Impact Of Size And Geographic Location On The Financial Condition Of Spanish Municipalities*. Transylvanian Review of Administrative Sciences, pp. 22-39.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Law Reform, Volume 15, Nomor 1, 149-163.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamid, A. A. (2018). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat*. Jurnal Sekuritas, Vol.1, No.4, 38-51.
- Harahap, I. M. (2013). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. (Pasca Sarjana). Universitas Sumatera Utara, Tesis.
- Honadle, B. W., Costa, J. M., & Cigler, B. A. (2004). *Fiscal Health for Local Government (An Introduction to Concepts, Practical Analysis, and Strategies)*. California, USA.
- Huda, A. S., Herwanti, T., & Pancawati, S. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat*. ASSETS, Volume 5 Nomor 2, 1-12.
- Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M. (2020). *Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten DiKalimantan*. Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 2, 175-183.
- Iqbal, M., Baga, L. M., & Hakim, D. B. (2017). *Desain Formulasi Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal BPPK, Volume 10 Nomor 1, Halaman 11 - 23.
- Kioko, S. N. (2013). *Reporting On The Financial Condition Of The States: 2002-2010* J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 25 (1), 165-198.
- Kooij, J., & Groot, T. (2021). *Towards A Comprehensive Assessment System Of Local Government Fiscal Health*. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 95(7/8), 233-244.

- Maher, C. S., & Nollenberger, K. (2009). *Revisiting Kenneth Brown's 10-Point Test*
- Maizunati, N. A. (2017). *Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam Klaster Kota di Jawa-Bali*. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Volume 2 No. 2, 139-162.
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019)*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No 4, 3452-3467.
- Nasution, N. A. (2010). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Panjaitan, F. (2020). *Analisis Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jurnal Mediasi, Vol. 2, No. 2, 136-148.
- Priyono, C. (2015). *Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011-2015*. Jurnal UGM, 1-36.
- Ritonga, I. T. (2014). *Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition*. Journal of Indonesian Economy and Business Volume 29, Number 2, 142 – 164.
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). *Assessing Financial Condition Of Local Government In Indonesia: An Exploration*. Public and Municipal Finance, Volume 1, Issue 2, 36-50.
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). *Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia*. Journal of Accounting and Investment, Vol. 20 no. 2, 1-25.
- Romarina, A., & Makhfatih, A. (2010). *Faktor-Faktor Risiko Fiskal dalam Penganggaran Daerah*. Jurnal BPPK, Volume 1, Nomor 2.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2015). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 4 23-32.
- Rumapea, M., & Siringoringo, G. (2020). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist, Volume 3, Nomor 2, 150-164.
- Rusmin, R., Astami, E. W., & Scully, G. (2014). *Local Government Units in Indonesia: Demographic Attributes and Differences in Financial Condition*. AABFJ, Volume 8, no. 2, 88-109.
- Safitri, S. (2016). *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 9.
- Santis, S. (2020). *The Demographic and Economic Determinants of Financial Sustainability: An Analysis of Italian Local Governments*. MDPI, 12, 1-16.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumenge, A. S. (2013). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 74-81.

- Suryani., Basri, H., & Faisal. (2016). *Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dan di Sumatera Utara*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol. 23, No.1 63, Halaman 63 – 71
- Suryawati, D. (2018). *Analisis Kesehatan dan Resiko Fiskal Daerah Untuik Mewujudkan Tata Kelola Yang Efektif (Effective Governance) Dalam Perspektif Soft Systems Methodology*. (Disertasi). Universitas Brawijaya, Malang.
- Wang, X., Dennis, L., & Tu, Y. S. (2007). *Measuring Financial Condition: A Study Of U.S. States*. Article in Public Budgeting & Finance
- Wulandari, I., Nugraeni, & Wafa, Z. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Daerah*. JRAMB, Volume 4 No. 2, 100-105.
- Yati, I. M., & Asmara, J. A. (2020). *Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 5, No. 2, Halaman 297-306.